

**PENDIDIKAN YANG MENINDAS**  
*(Tinjauan Kritis Terhadap Pendidikan di Indonesia)*

ANDI SAPUTRA

Email: andisaputra@yahoo.co.id

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

***Abstract***

*Education is not only a means of transferring knowledge, social and culture, but also a means of inheriting ideology of the nation to the next generation. A nation becomes strong, courageous, and glorious, and conquers other nations by its strong and good educational system, and its implementation. It is generally believed that the education of a nation will automatically follow the ideology of that nation. Pancasila as the ideology of Indonesian should properly become spiritual aspect of national education system. Ironically, it remains a history which was shouted so often to ease the oppressors' existence in a covered oppression. Besides, it seems that nowadays educational philosophy has lost its identity due to consuming western educational philosophy superfluously. In this case, it is imperative that education in Indonesia should return to our national philosophy, Pancasila, for the sake of prestige and identity of the nation.*

***Keywords:*** Education, Indonesia, oppressing education

**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan SDM yang berkualitas, baik berkualitas secara intelektual maupun moral. Pendidikan merupakan rancangan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan masyarakat luas (Nata, 2001: 81). Tirtarahardja (2000: 1) menambahkan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membantu peserta didik menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Selain itu pendidikan juga mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya, tetapi juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya, ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Suatu bangsa menjadi kuat, perkasa, dan berjaya serta menguasai bangsa-bangsa lain dengan sistem pendidikannya yang kuat dan baik, serta pelaksanaannya, dan bukan rahasia lagi jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa tersebut.

Fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara dan bangsa khususnya dalam melestarikan keberibadian dan kebudayaan bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan pancasila seyogyanya terbina mantab demi tegaknya martabat dan keberibadian bangsa. Filsafat pendidikan pancasila merupakan aspek ruhaniyah atau spiritual sistem pendidikan nasional. Ironisnya pancasila kini hanya tinggal sejarah yang selalu didengung-dengungkan dalam rangka melancarkan jalan para penindasan untuk eksis dalam penindasan yang terselubung. Selain itu nampaknya filsafat pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan identitas dan jati dirinya akibat terlalu banyak mengkonsumsi filsafat pendidikan barat tanpa adanya filter untuk menyaring nikotin yang membahayakan bagi paru-paru pendidikan di Indonesia itu sendiri.

Ketika pancasila tidak lagi menjadi jati diri dalam karakter manusia Indonesia maka yang terjadi adalah masuknya ideologi-ideologi asing, dan dalam pendidikannya akhirnya nilai-nilai pancasila hanya sebagai hiasan dalam perundang-undangan belaka, maka ketika ini terjadi dalam sistem pendidikan kita maka berkembanglah pendidikan yang menindas, baik dalam kurikulum, persekolah, dan bahkan kebijakan-kebijakan pun akhirnya tidak lagi berorientasi pada pembentukan, pewarisan ideologi bangsa yang seharusnya kita pegang teguh, akan tetapi berganti dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang semakin memperpuruk dunia pendidikan kita. Padahal dunia pendidikan seharusnya sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa, haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini, ini hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing, pada akhirnya seperti apa yang kita lihat dalam dunia pendidikan kita saat ini yang hanya menjadi lahan industri, penciptaan robot-robot pasar belaka.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terbentuk atas dasar konfigurasi multi-etnik dan multi kultural di dalamnya. Sebaran kehidupan kelompok-kelompok yang mendiami wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke terdiri dari aneka ragam kelompok yang berbeda atas dasar kesukuan, etnisitas, kedaerahan, bahasa, adat istiadat, dan agama (Rohman, 2009: 41). Maka atas dasar inilah perlu adanya konsensus bersama antar kelompok tentang nilai-nilai dasar yang disepakati. Pancasila merupakan seperangkat nilai dasar yang telah disepakati bersama antar kelompok masyarakat dengan semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang artinya meskipun berbeda-beda namun tetap satu.

Negara republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah negara pancasila. Predikat prinsipil ini berdasarkan ketentuan yuridis-konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan pancasila, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketentuan yuridis-konstitusional ini mengandung makna konsekuensi baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif bahwa: *Pertama*, pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara republik Indonesia. *Kedua*, pancasila adalah norma dasar dan norma tertinggi di dalam negara republik Indonesia. *Ketiga*, pancasila adalah ideologi negara ideologi nasional Indonesia. *Keempat*, pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau keperibadian nasional, yang perwujudannya secara melembaga, sebagai sistem kenegaraan pancasila. *Kelima*, pancasila adalah jiwa dan keperibadian bangsa, pandangan hidup (keyakinan bangsa) yang menjiwai sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia yang

potensial dan fungsional, yang normatif ideal (Syam, 1986: 345-346). Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Menurut Kaelan, ini lebih dikarenakan nilai-nilai Pancasila pada mulanya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa, karena itulah ini diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara (Kaelan, 2004:123).

Filsafat negara menjadi sumber segala kegiatan atau mewarnai segala aktivitas warga negara dalam suatu bangsa, filsafat pendidikan dijabarkan dari filsafat, artinya filsafat pendidikan tidak boleh bertentangan dengan filsafat umum atau filsafat bangsa (Maunah, 2009:40). Jadi, filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut tanpa terkecuali aspek di bidang pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri.

Menurut Ahmad Tafsir kata filsafat itu sendiri digunakan untuk menunjukkan berbagai obyek yang berbeda: *Pertama*, filsafat digunakan sebagai bidang ilmu pengetahuan. *Kedua* istilah filsafat digunakan untuk menamakan hasil karya. *Ketiga*, istilah filsafat telah digunakan juga untuk menunjukkan nama suatu keyakinan. *Keempat*, istilah filsafat digunakan untuk memberi nama suatu usaha untuk menemukan pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu. *Kelima*, istilah filsafat digunakan untuk menamakan orang yang cinta kepada kebijakan dan ia berusaha mencapainya (Tafsir, 2005:13). Adapun dari berbagai istilah filsafat di atas, tampaknya yang cocok dengan pembahasan ini adalah filsafat digunakan untuk menunjukkan kepada suatu keyakinan.

Definisi pendidikan paling umum mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses pemanusiaan menuju lahirnya insan yang bernilai secara kemanusiaan. Agenda utama pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia menjadi manusia (Danim, 2003: 4). Pendidikan selalu dihubungkan dengan

manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk ciptaannya yang lain di muka bumi ini. Manusia memiliki kebebasan, kebebasan bisa diartikan sebagai kemandirian sebagai manusia. Manusia disebut bebas bila ia dapat melepaskan dirinya dari sesuatu yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh (Sindhunata, 2000: 190).

Tujuan pendidikan umumnya adalah membentuk manusia seutuhnya, dalam artian berkembangnya potensi-potensi individu secara harmonis, berimbang dan terintegrasi. Sedangkan tujuan akhir dalam pendidikan biasanya tercakup dalam filsafat pendidikan dan filsafat bangsa yang melaksanakan pendidikan itu. Tujuan pendidikan di Indonesia khususnya adalah membentuk manusia yang pancasilais, dimotori oleh pengembangan afeksi (Maunah, 2009: 37). Maka untuk terciptanya tujuan ini kita membutuhkan pendidikan yang bercorak Indonesia sesuai dengan kondisi Indonesia, kita perlu merumuskan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ruh filsafat bangsa Indonesia yang dielaborasi dalam sistem pendidikan kita.

Untuk membentuk teori pendidikan yang valid, terlebih dahulu membutuhkan filsafat yang bercorak Indonesia yang memadai. Namun filsafat yang cocok dengan alam budaya Indonesia belum terbentuk. Menurut Binti Maunah, pancasila baru hanya pada tataran filsafat negara saja, maka tidak hanya konsep pendidikan saja yang bisa diturunkan dari filsafat Negara (Maunah, 2009: 46-47). Dengan kata lain sistem pendidikan nasional disusun atas dasar filsafat pancasila, sebab filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang bersandikan filsafat suatu bangsa (Jalaludin dan Idi, 1997:160).

Ketika pancasila hanya sekedar sejarah atau bahkan hanya sekedar celotehan saja, maka yang terjadi adalah nilai-nilai pancasila sebagai filsafat negara kita tidak lagi menjadi dasar segala aktivitas warga negara dalam suatu bangsa, dan jika filsafat pendidikan yang dikembangkan tidak berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa (pancasila) maka bisa dikatakan kita telah mengkhianati pancasila. Untuk konteks Indonesia saat ini dalam sistem pendidikan kita masih mengandung nilai-nilai pancasila, namun ironisnya ketika kita benturkan dengan realitas pendidikan yang berkembang di masyarakat,

pendidikan kita tidak lagi dijiwa dengan pancasila, namun lebih cenderung materialis dan pragmatis, realitas pendidikan kita sudah mengabaikan nilai-nilai pancasila.

## **2. Realitas Pendidikan Yang Menindas**

Memasuki pembahasan ini dengan sub bab pendidikan yang menindas, pernyataan ini bagi saya memang pantas dan layak diajukan, ini dikarenakan kini Indonesia telah memasuki era globalisasi, pelaku utama atau subjek globalisasi adalah negara-negara industri maju, globalisasi merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan negara industri maju (Sindhunata, 2000: 103). Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang sedang berkembang, yang lebih dikatakan sebagai objek dari pada globalisasi. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap negara-negara maju dalam berbagai bidang, baik itu keuangan, ekonomi, maupun teknologi, dan adanya keinginan untuk mengejar kemajuan. Dengan orientasi inilah seolah-olah Indonesia menggadaikan identitas dirinya, karena baik sadar maupun tidak Indonesia lebih bersifat pasif dibawah ketiak bangsa asing.

Terlebih lagi pemerintahan kita kini tidak bisa melakukan apa-apa, karena setiap kebijakan selalu dikontrol oleh pihak asing ini dikarenakan masuknya ideologi neoliberal yang menghegemoni bangsa Indonesia, Neo liberalisasi adalah liberalisasi perdagangan dan finance, biarkan pasar menentukan harga, mengakhiri inflasi, stabilitas ekonomi makro, dan pemerintah harus menyingkir menghalangi jalan mereka. Belum lagi hutang luar negeri, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa hutang luar negeri merupakan instrumen kapitalisme global dalam menghisap negara-negara dunia ketiga. Melalui hutang independensi sebuah negara digerogoti dan menjadi tak berdaya di hadapan si pemberi hutang. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Nuryatno perkawinan antara globalisasi dan neoliberalisme melahirkan dominasi yang luar biasa. Perkawinan keduanya menjadi hegemonik (teori sosial, sistem ekonomi-politik, dsb) selalu dikonstruksi dan disebarkan dari center (peradaban barat) ke wilayah-wilayah lain di muka bumi ini. Lebih lanjut Agus Nuryatno menerangkan *global intellectual hegemony*, berkebang luas dan menghegemonik karena disokong dan didesak melalui perusahaan TNC, institusi-institusi keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, serta organisasi-organisasi kerjasama perdagangan dunia seperti

WTO, AFTA, dan NAFTA (Nuryatno, 2008: 66-67). Hegemoni yang awalnya hanya dibidang ekonomi saja ternyata kini telah masuk juga ke dalam dunia pendidikan kita.

Bentuk-bentuk dari penindasan dalam pendidikan itu sendiri adalah hegemoni kurikulum, penguasa sangat kuat menancapkan taring kekuasaan dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya perumusan dan pelaksanaan kurikulum, bongkar pasang kurikulum, setiap ganti pemerintahan berganti pula kebijakannya. Kurikulum selalu menerjemahkan “belajar dari kegiatan” menjadi sebuah komoditas di mana sekolah memonopoli pasar. Kurikulum seolah disiapkan dan dirancang untuk disesuaikan dengan karakter masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Padahal kurikulum selalu diubah dan diperbaharui dalam jangka waktu kurang dari lima tahun. Indikasi yang dapat ditangkap adalah setiap pergantian kurikulum akan selalu menghadirkan proyek yang melimpah bagi pemilik “percetakan buku” (Susilo, 2007: 25). Sehingga silogismenya perubahan kurikulum bukan untuk kepentingan masyarakat, namun demi kepentingan pemilik modal. Akhirnya guru hanya sebagai distributor yang menyajikan hasil akhir dari kurikulum kepada para murid sebagai konsumen (Illich, 2008: 56).

Sementara jika kita berbicara pada kualitas pendidikan Indonesia yang hanya berorientasi pada pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini membuat peserta didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Pembunuhan kreatifitas ini disebabkan pula karena paradigma pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri yang sedang gencar-gencarnya ditumbuhs suburkan di Indonesia. Perubahan politik di negara ini selalu mengorbankan konsep dan sistem pendidikan sehingga kesinambungan program-program pendidikan tidak pernah berjalan mulus. Ironisnya setiap pergantian menteri selalu melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang sesungguhnya tidak memiliki dasar filosofis yang memadai. Pendidikan terkesan menjadi alat perjuangan politik kaum elitis dan dimanfaatkan sebagai sarana mempertahankan kelas tertentu.

Nampaknya pendidikan kita lebih percaya dan menyukai konsep-konsep sebagai epigon dari barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Ajaran lokal yang sarat dengan nilai moral seringkali dianggap kuno dan tidak sesuai dengan jamannya karena teropong modernitas telah menjebak membentuk pemikiran bahwa sesuatu yang modern diposisikan sebagai sesuatu yang lebih baik. Pendidikan kita nampaknya sedang menderita sakit leher karena keengganan untuk kembali menengok ajaran moral dan nilai-nilai lokal untuk diintegrasikan dalam praktek pendidikan, materialisasi pendidikan melalui budaya konsumerisme juga sudah meracuni dunia pendidikan. Bongkar pasang kurikulum mulai dari konsep CBSA, MBS (School Based Management), Manajemen Berbasis Masyarakat (Community Based Management), Life Skill sampai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), KTSP dan sekarang Kurikulum 2013, ini mungkin akan terus dilakukan. Proses tambal sulam dan uji coba merupakan indikator sederhana bahwa dunia pendidikan telah kehilangan identitas dan rasa percaya dirinya. Kini pendidik menjadi calok dari sistem kapitalis yang mengkungung siswa dalam sebuah market pasar yang bernama sekolah (Darmaningtyas, 2004: 136).

Menarik apa yang diungkapkan oleh Moh Yamin, menghadapi hal ini pendidikan tertatih-tatih ditengah hegemoni kekuasaan dan penguasa, menurutnya pendidikan menghambakan diri pada penguasa, bukan lagi kepada rakyat atau bangsa. Pendidikan mengamini segala bentuk yang dikehendaki oleh penguasa bukan mengamankan segala aspirasi yang berasal dari kalangan bawah atau masyarakat sebagai konsumen pendidikan (Yamin, 2008: 138-139). Dunia pendidikan telah menjadi alat penindasan sistematis yang mendehumanisasi manusia atau kurang dari manusia bahkan tidak manusia lagi. Sebetulnya terdapat relasi resiprokal (timbang-balik) antara dunia pendidikan dan dengan kondisi masyarakat. Namun, cerminan realitas ketertindasan masyarakat Indonesia tidak dicerminkan dalam kurikulumnya. Yang justru dicerminkan ialah orientasi kurikulum pendidikan yang menjadikan anak banga menjadi jongs kapitalisme.

Pemberlakuan undang-undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bulan juli tahun 2003, kini telah membawa implikasi cukup serius dalam dunia pendidikan nasional. Kini dimensi

moral akhlak dan budi pekerti mendapatkan apresiasi secara khusus dalam undang-undang tersebut (Zubaedi, 2007: 38). Namun bila kita lihat pada tataran realitasnya, dimensi-dimensi lain seperti afektif dan psikomotorik gagal diimplementasikan dalam sistem pendidikan sebagai ciri profesional yang mengintegrasikan antara intelektual, moral, spiritual tidak tercermin pada para lulusannya. Krisis identitas mewarnai individu-individu yang terlahir dari dunia pendidikan dan cenderung tidak percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri. Masifikasi gelombang modernitas telah membawa siapapun termasuk dunia pendidikan untuk hanyut mengikuti mainstream dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan alasan tidak ingin teralienasi dan dikatakan alergi terhadap modernitas. Dalam kondisi seperti ini hegemoni konsep-konsep pendidikan ala barat sulit bisa dihindari, cenderung mencibirkan konsep-konsep dan ajaran lokal meskipun diyakini syarat dengan nilai-nilai moral. Ini merupakan indikasi bahwa pendidikan di Indonesia telah mengkhianati amanat falsafah bangsa kita, karena gagal memelihara nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat.

Ketika hilangnya nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan kita termasuk pendidikan, maka yang terjadi adalah masuknya ideologi neoliberalisme dalam pendidikan, Agus Nuryatno menulis setidaknya ada dua pengaruh di bidang pendidikan akibat masuknya ideologi neoliberal ini. *Pertama*, memunculkan ideologi kompetisi dalam pendidikan, contohnya sistem ranking dalam persekolahan, hasilnya adalah adanya pemenang dan pecundang. *Kedua*, liberalisasi pendidikan, yang menghasilkan kebebasan individu, pemilikan pribadi dan inisiatif individu serta usaha swasta (Nuryatno, 2008: 67-73). Konsekwensi dari liberalisasi dunia pendidikan adalah pendidikan menjadi eksklusif, jauh dari masyarakat umum, dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu (elit penguasa). Lalu, pendidikan mulai bergeser perannya bukan untuk memperoleh pengetahuan dan penyadaran, tetapi justru menjadi sarana untuk menyebarkan hegemoni kekuasaan agar penindasan yang dilakukan menjadi langgeng dan tanpa perlawanan.

Pendidikan yang merupakan hak asasi setiap manusia dalam menjalani proses kehidupannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak lain karena hakekat dari pendidikan itu sendiri adalah kebebasan untuk menentukan nilai hidup dan nilai kodrati yang diberikan oleh Tuhan (Illich, 2004: 200). Pendidikan

tidak bisa diukur dengan nilai yang dihasilkan dari serangkaian ujian melalui soal-soal ulangan yang jauh dari substansi kehidupan. Pendidikan bukan nilai-nilai yang tercantum dalam raport, juga bukan nilai yang ada dalam ijazah. Tapi pendidikan adalah usaha sadar dalam proses pendewasaan manusia untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik (Darmaningtyas, 2007:1). Sekolah tidak memberi keleluasaan kepada seorangpun untuk mendidik diri sendiri atau mendidik orang lain jika tidak memiliki sertifikat dan ijazah tenaga profesional yang sah (Illich, 2004: 1). Fungsi seorang pendidikpun dibatasi hanya sebagai penyampai apa yang ada di dalam teks materi ajar (Yamin, 2009:49). Guru tidak lagi menjadi pendidik yang mendampingi dan membimbing siswanya untuk menemukan ilmu pengetahuan bersama-sama. Guru lebih menjadi penyokong sistem sekolah yang menghegemoni proses belajar siswa.

Pendidikan kita sesungguhnya sedang berada dalam ikatan kapitalisme global. Pendidikan Indonesia berada dalam hegemoni pihak asing yang kuat secara ideologi dan modal. Dampak dari ini pendidikan diserahkan kepasar, maka akan menyulitkan masyarakat guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Indonesia yang sudah masuk pada lingkungan neoliberalisme pasca digelarnya kebijakan otonomi pendidikan telah menyebabkan dunia pendidikan menjadi perdagangan bebas. Ketika suatu sistem pendidikan Nasional menggunakan paradigma liberal, maka visi kerakyatan akan hilang, pendidikan dengan standar kualitasnya ditentukan oleh berapa banyak dan modal yang dimiliki (Mu'arif, 2008:85). Otonomi pendidikan yang digulirkan pemerintah, ini sama halnya dengan membiarkan pendidikan diserahkan kepada pasar. Pemerintah tidak mau bertanggung jawab dengan hal tersebut, ini adalah realitas pendidikan saat ini yang selanjutnya mengarah pada komersialisasi pendidikan. Sistem pendidikan seperti ini diarahkan hanya sekedar mewujudkan orang terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Sistem pendidikan seperti ini cenderung menciptakan robot-robot yang peka terhadap persoalan instruksi teknis tetapi cenderung bebal terhadap masalah-masalah moral (Nugroho, 2004:38). Output tujuan pendidikan kita sangat materialistik. Lulusan sekolah selalu dilihat jadi pejabat apa. Padahal harusnya yang dibangun adalah kemandirian berpikir.

Ukuran keberhasilan pendidikan hanya didasarkan pada besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri. Sedangkan dalam realitasnya, tidak semua orang mau terjun ke sektor industri, ada orang yang lebih senang bergerak di sektor agraris, perdagangan, seni dan lainnya (Darmaningtyas, 2007: 256-257). Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan selalu diukur dari megahnya gedung, mahalnnya biaya, banyaknya peminat dan seberapa banyak alumnynya yang menjadi pejabat. Materialisasi pendidikan inilah yang menjadi landasan awal terjadinya materialisasi dalam semua aspek kehidupan. Jati diri sebagai bangsa yang suka bergotong royong, saling tolong menolong dan kekeluargaan menjadi terkoyak karena semua pola hubungan serba diukur dengan materi. Untuk pendidikan ke Indonesiaan saya setuju dengan Paulo Freire dengan pendidikan hadap masalahnya, dalam pendidikan hadap masalah; manusia mengembangkan kemampuannya untuk memahami secara kritis cara mereka mengadakan dalam dunia dan menemukan diri sendiri, bukan gaya Bank yang menyembunyikan fakta-fakta tertentu (Freire, 2008: 69), dan tentu saja dijiwai oleh falsafah hidup bangsa kita.

Pendidikan kita saat ini cenderung mereduksi sebagai lembaga kursus, terutama kursus bahasa inggris dan kursus komputer. Hal ini didasarkan pada pandangan global, bahwasanya kemampuan bahasa inggris dan komputer merupakan syarat memasuki pasar global. Pandangan seperti ini tidak keliru, tapi menyesatkan apabila dijadikan ideologi baru untuk mendesain pendidikan nasional. Tanpa kita sadari sistem pendidikan nasional justru menyumbang pada timbulnya kekerasan budaya. Sebab mengutamakan satu bahasa dan memarjinalkan bahasa lain baik bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kita melakukan pembunuhan karakter masyarakat. Padahal, pendidikan seharusnya menanamkan benih-benih keragaman, pluralisme dan multikultural, bukan keseragaman dan monokultur (Darmaningtyas, 2007:258).

Pendidikan juga dijadikan alat untuk proses dominasi orang yang menguasai ilmu pengetahuan meniadakan prinsip-prinsip kesadaran aktif. Pendidikan ini menjalankan praktek-praktek yang menjinakan kesadaran manusia, mentransformasikan ke dalam wadah kosong (Freire, 2007:191). Pendidikan bukan lagi sebagai praktek kebebasan dan membebaskan tetapi malah dijadikan

alat untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan yang berkepentingan. Proses pembebasan melibatkan arkeologi kesadaran, sehingga manusia secara alamiah dapat membangun kesadaran baru yang sanggup merasakan keberadaan dirinya. Proses dominasi atau mistifikasi tidak mengembangkan kesadaran baru namun justru irrasionalitas, tetapi ini tidak berarti kita kembali kepada sebuah cara hidup instingtif atau cara hidup yang mendistorsi akal pikiran. Dalam mistifikasi orang tidak dilarang untuk berfikir, tetapi disediakan ilusi atau pengaburan realitas yang menjadikan masyarakat yang di dominasi sulit untuk menggunakan akal pikirannya.

Dalam perspektif Gramsci sebagaimana dikutip oleh Arif Rohman, selain dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga yang disebut sekolah. Lembaga sekolah ini dianggap sebagai strategis karena ia memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif, nilai-nilai dan keterampilan pada peserta didik. Muatan-muatan nilai dan kognitif inilah kemudian yang selanjutnya dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (negara), yang selanjutnya sekolah dipaksa agar mau menginjeksikan ideologis tersebut kepada kognisi peserta didik (Rohman, 2009: 13).

Pendidikan adalah proses pembebasan dan pendidikan adalah proses membangkitkan kesadaran kritis. Caranya sebagaimana diungkapkan oleh Freire dengan dialog, dialoglah yang menuntut adanya pemikiran kritis, apa yang perlu didialogkan, dalam konteks Indonesia yang perlu didialogkan adalah nilai-nilai filsafat Pancasila itu sendiri yang kemudian dialogkan dengan tujuan pendidikan kita. Namun sekali lagi syarat utama pendidikan sendiri terlebih dahulu harus membebaskan diri dari pasungan dan dominasi kepentingan kapitalisme dan politisasi pendidikan. Penulis setuju dengan pendapat Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah, bahwa kemandirian bersumber dari kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dalam lingkungan yang berubah, baik lingkungan alam, masyarakat, ataupun lingkungan antar bangsa tanpa mengorbankan jati diri bangsa. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang tidak perlu tergantung pada bangsa lain untuk kelangsungan hidupnya, kemudian kemandirian bukan hanya

bersumber dari kemampuan untuk menjamin kelangsungan hidup tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri (Suryadi dan Budimansyah, 2004:43).

Kita juga bisa melihat lembaga pendidikan sekarang beralih fungsi menjadi lahan empuk untuk melakukan penindasan terhadap peserta didik, baik penindasan dalam bentuk industri pariwisata, industri tekstil dan industri penerbitan (Darmaningtyas, 2007:255). Contoh industri pariwisata; kewajiban mengikuti studi tur, industri tekstil; membuat seragam di sekolah, industri penerbitan; kewajiban membeli buku LKS dll. Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Indikator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di dalam rapor maupun ijasah tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Pendidikan bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijasah hingga jual-beli nilai. Belum lagi diakibatkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi.

Banyak orang membicarakan kepentingan manusia, namun hanya menjadi sebuah ungkapan kosong, karena mereka tidak mengerti bahwa kenyataan dimensi humanis manusia hanya dijadikan objek penderitaan. Banyak orang mengelaim dirinya mempunyai komitmen dalam usaha pembebasan tetapi mereka masih menganut mitos yang menentang tindakan-tindakan humanis. Semangat membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekuasaan maupun hegemoni, yang secara hakiki justru jatuh dalam sebuah dogmatis baru. Pencerahan yang ingin meningkatkan martabat manusia melalui penggunaan nalar justru jatuh dalam ideologi yang berorientasi tekhnis (Nugroho, 2004: 29-30).Semangat emansipasi yang menjadi landasan diganti oleh instruksi kontrol atas proses-proses yang diobyektifkan, tingkah laku manusia menjadi obyek yang dapat dimanipulasi.

Kata pembangunan sering dijadikan celotehan dalam setiap kebijakan dan kegiatan kurikulum, ini telah cenderung menjadi mitos dan mengalami sakralisasi. Arti pembangunan itu sendiri adalah perubahan sosial dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik yang seolah-olah tesembunyi nilai kebaikan dibalik pelaksanaan pembangunan, ini dikarenakan tujuan dan anggapan dasarnya adalah baik, maka proses pembangunan mengizinkan pengorbanan-pengorbanan berbagai dimensi kemanusiaan. Pertanyaannya kemudian nilai yang dianggap baik itu menurut siapa? Lapisan yang mana dan kelompok yang mana yang harus dikorbankan?

Konsep pembangunan itu sendiri adalah pembebasan manusia, lalu bagaimana dengan fenomena-fenomena yang seolah-olah mengizinkan untuk mengorbankan manusia, seperti atas nama pembangunan muncullah berbagai penggusuran paksa, maka realita seperti ini menunjukkan bahwasanya proses pembangunan itu sendiri mengalami kontradiksi dengan substansi nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang bertujuan merubah kondisi sosial dilaksanakan dengan cara memberdayakan ekonomi, ironisnya hal ini cenderung menciptakan ketidak berdayaan politis dan lapisan masyarakat tertentu. Pembangunan kita sekarang lebih cenderung kepada pembebasan masyarakat dari kemiskinan ekonomi, namun tidak membebaskan manusia dari kondisi politik tanpa dominasi atau demokratis.

Oleh karenanya kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila untuk pendidikan kita. *Pertama*, membumikan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membumikan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Pancasila yang sesungguhnya berada dalam tataran filsafat harus diturunkan ke dalam hal-hal yang sifatnya implementatif. Contoh; pendidikan tidak membeda-bedakan usia, agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu, mendapatkan perlakuan yang sama dalam pendidikan (Jalaludin dan Abdullah Idi, 1997:174). Singkatnya sekolah harus mencerminkan sila-sila dalam pancasila. *Kedua*, internalisasi nilai-nilai pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non formal (masyarakat). Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran, dengan cara

internalisasi nilai-nilai pancasila di sekolah. Pembelajaran kita selama ini dianggap oleh banyak kalangan gagal sebagai media penanaman nilai-nilai pancasila. Bahkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah kognitif) sedangkan ranah afektif dan psikomotorik masih kurang diperhatikan. Hal ini diperparah dengan adanya anomali antara nilai positif di kelas tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Sungguh dua realitas yang sangat kontras dan kontradiktif. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi alat penanaman nilai-nilai pancasila bagi generasi muda. *Ketiga*, ketauladanan dan kenasionalisme dari para pemimpin, dengan ketauladanan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikutinya. Hal ini disebabkan masyarakat kita masih kental dengan budaya paternalistik yang cenderung mengikuti perilaku pemimpinnya. Kenasionalisme ini diharapkan pemimpin dari bisa benar-benar menerapkan nilai-nilai pancasila, bukan hanya sekedar gagasan kosong, tetapi setiap kebijakannya didasarkan pada cita-cita bangsa dan nilai luhur dari pancasila.

### C. KESIMPULAN

Pendidikan telah mengkhianati misi utamanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membeda-bedakan status sosial. Realitasnya pendidikan saat ini lebih sibuk melayani golongan sosial tertentu dan menjadi pelayan setia pada kapitalisme. Materialisasi pendidikan sudah mulai menggejala dan menggeser ideologi pendidikan mengarah kepada ideologi material-kapitalis dan kurikulum disusun dan diorientasikan untuk mampu mendapatkan pekerjaan dibungkus dengan baju modernitas.

Harus diakui pendidikan telah kehilangan orientasi dan mengalami krisis identitas. Kita tidak memiliki sistem pendidikan yang bersifat ke Indonesiaan. Melihat dari berbagai masalah di atas, dapat disimpulkan karena kita mengkhianati dari nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Filsafat Pendidikan pancasila sudah seharusnya sebagai sebuah paradigma pendidikan yang mampu mensintesakan antara keinginan sistem pendidikan modern dan sistem pendidikan yang menginginkan terjaganya nilai-nilai manusia

pancasilais, dan perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai pancasila seharusnya tidak hanya menyentuh ranah kognisinya saja, tapi juga pada ranah afeksi dan psikomotorik.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Darmaningtyas. 2007. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. L. LKiS. Yogyakarta.
- Freire, Poulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Terj. LP3ES. Jakarta.
- Illich, Ivan. 2008. *Bebaskan Masyarakat Dari Belenggu Sekolah*. Terj. Sonny Keraf. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Jalaludin dan Abdullah Idi. 1997. *Filsafat Pendidikan; Manusia. Filsafat. Dan Pendidikan*. Gaya Media. Jakarta.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Pardigma. Yogyakarta.
- Maunah, Binti. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. Teras.
- Mu'arif. 2008. *Liberalisasi Pendidikan*. Pinus Book Publisher. Yogyakarta.
- Nata, Abudin. 2001. *Paradigma pendidikan Islam*. Jakarta. PT. Grasindo bekerjasama dengan IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Noor Syam, 1986. Mohammad. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Nugroho, Heru. 2004. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nuryatno. Agus. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis; Menyikapi Relasi Pengetahuan. Politik dan Kekuasaan*. Resis Book. Yogyakarta.
- Rohman. Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta. LaksBang Mediatama.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi. Ekonomi. Civil Society. Globalisasi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Baru*. PT Genesindo. Jakarta.
- Susilo, M. Joko. 2007. *Pembodohan Siswa Tersistematis*. Pinus. Yogyakarta.

- Tafsir, Ahmad. 2005. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. PT Remaja Rosdakarya Ofset. Bandung.
- Tirta Raharja, Umar dan La Sula. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rhineka Cipta. Jakarta.
- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan; Panduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum Yang Progresif Dan Inspiratif*. Diva Press. Yogyakarta.
- Zubaedi. 2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.